EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025 #RISETOGETHER

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

TRIWULAN I

2025

PPS BUNGUS RANCAK

Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

djpt bersinergi

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 2

1.3 Maksud dan Tujuan 2

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM **3**

2.1 Pelaksana SKM 3

2.2 Metode Pengumpulan Data 3

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 4

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 4

2.5 Penentuan Jumlah Responden 4

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM **6**

3.1 Jumlah Responden SKM 6

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 7

BAB IV ANALISIS HASIL SKM **9**

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 9

4.2 Rencana Tindak Lanjut 9

4.3 Tren Nilai SKM 10

BAB V KESIMPULAN **11**

LAMPIRAN **12**

1. Kuesioner 13
2. Hasil Pengolahan Data 14
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diterapkan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya, serta menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, kurang konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif.

Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah Survey Indeks Kepuasan Masyrakat (SKM).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

BAB II
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasa Masyrakat (SKM) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dilaksankan oleh Pokja Dukungan Manajerial berkolaborasi dengan Tim Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2.2 Metode Pengumpulan SKM

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penilaian terhadap kepuasan masyarakat pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2025 di PPS Bungus ini adalah dengan membagikan tautan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2025 dari aplikasi SUSAN KKP. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana**, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2025 ini dilakukan di area Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PPS Bungus. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Maret Tahun 2025, dengan rincian:

No	Tanggal	Kegiatan
1.	1 Januari s.d 31 Maret 2025	Melakukan survey secara daring kepada pengguna jasa layanan
2.	9 s.d 25 April 2025	Mengolah data, membuat laporan dan selanjutnya dipublikasikan

2.5 Penetapan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan adalah 250 responden. Selanjutnya responden dipilih secara

acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan Tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 196 orang.

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan jenis pelayanan yang diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, beberapa pengguna layanan yang berhasil dijadikan responden yaitu sejumlah 196 orang dengan rincian tertuang dalam diagram di bawah ini:

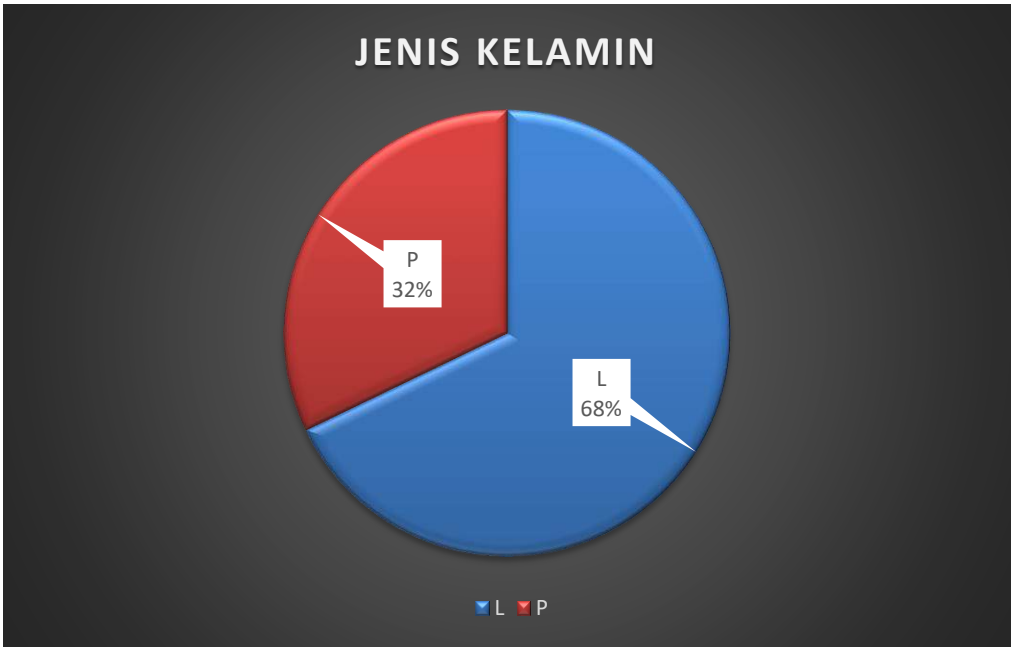

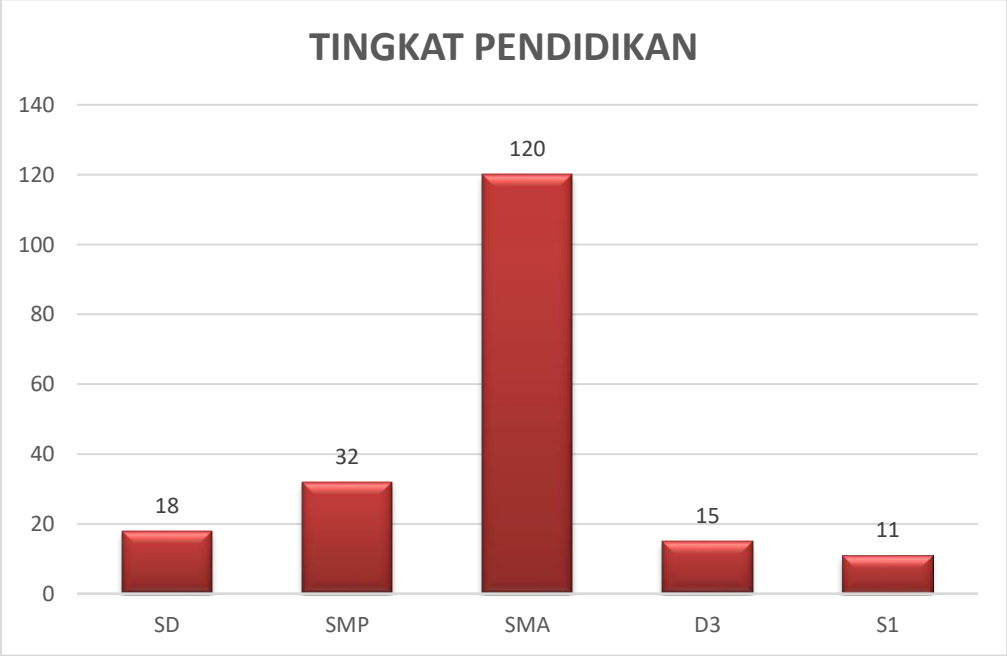

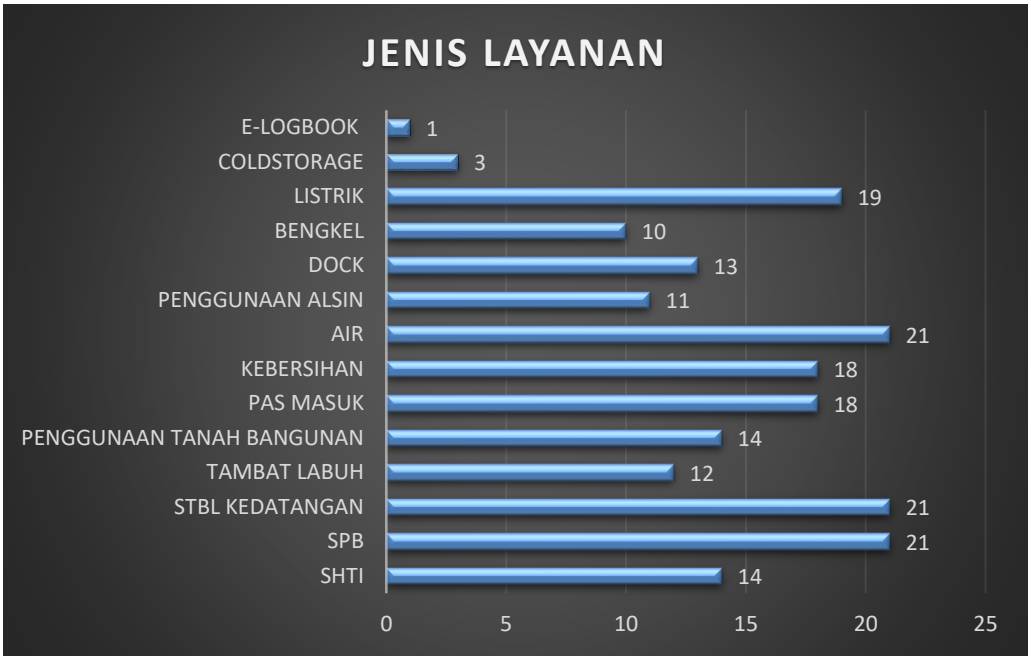

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan

Berdasarkan hasil dari data kuesioner kepuasan masyarakat didapatkan nilai NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara lengkap sebagai berikut:

	NILAI UNSUR LAYANAN								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
IKM Per Unsur	98.09	97.96	97.83	97.96	98.09	97.96	98.09	97.96	97.96
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	**97.99**								

Dari hasil data kuisioner kepuasan masyarakat didapatkan nilai NRR (Nilai Rata-Rata) per unsur. Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara lengkap sebagai berikut:

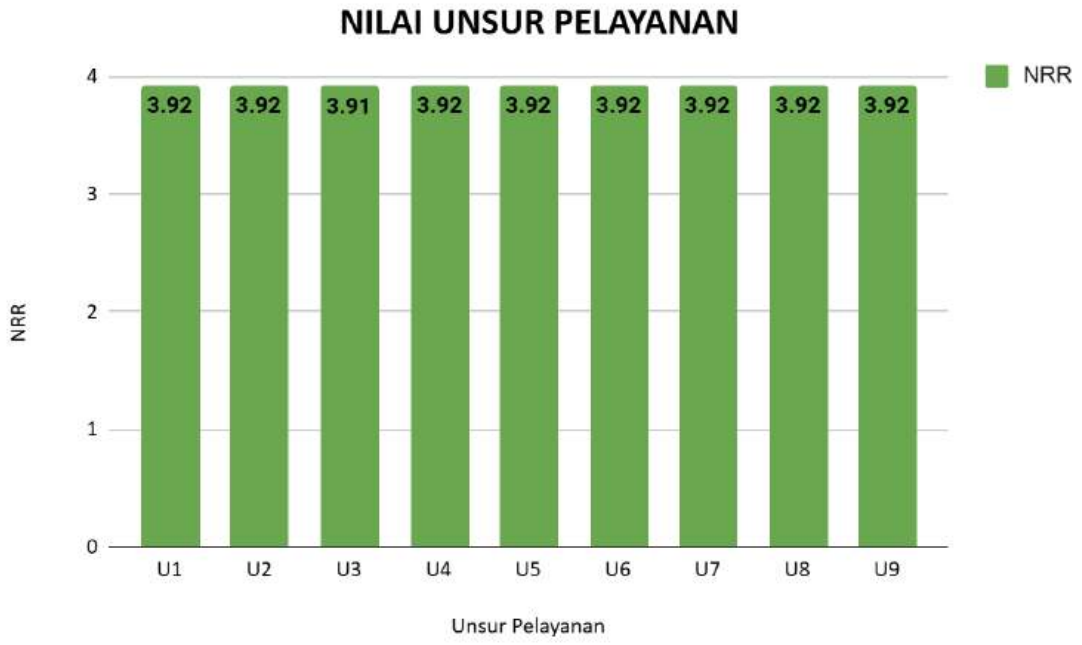
NILAI UNSUR PELAYANAN
NRR
4
3
2
1
0
3.92
3.92
3.91
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
3.92
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
Unsur Pelayanan

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan

Berdasarkan pengolahan data tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh unsur pelayanan memiliki nilai 3.92 sehingga mutu pelayanan dianggap sangat baik.
2. IKM unit layanan mendapatkan nilai 97.99 dengan predikat A atau Sangat Baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pelayanan air yang diberikan semakin cepat layanannya
2. Mohon diperbaiki sistem aplikasi online (SPB) yang ada
3. Sebaiknya perawatan peralatan dan mesin dilakukan secara rutin

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut adanya kritik dan saran yang membangun dari stakeholder tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Rincian Kritik dan Saran	Program atau Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Diharapkan pelayanan air yang diberikan semakin cepat layanannya	1 Pengarahan Petugas Pelayanan terkait SOP Air					Katimja Pelayanan Usaha
2	Mohon diperbaiki sistem aplikasi online (SPB) yang ada	2 PPS Bungus akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan cq. Katimja Kesyahbandaran terkait waktu maintenance aplikasi agar dilakukan tidak pada jam pelayanan.					Katimja Kesyahbandaran
		3 Melakukan evaluasi penyedia layanan internet di ruang pelayanan untuk meningkatkan kualitas jaringan sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai SOP					
3	Sebaiknya perawatan peralatan dan mesin dilakukan secara rutin	4 Dilakukan pengecekan berkala dan perencanaan pemeliharaan					Katimja Pelayanan Usaha

4.3 Tren Nilai SKM

Berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97.99, maka dengan ini dinyatakan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 6.62 dibandingkan dengan periode triwulan IV Tahun 2024 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.37. Hal ini dikarenakan adanya evaluasi dan perbaikan pelayanan yang dilakukan secara terus menerus dan jumlah responden yang tidak sama.

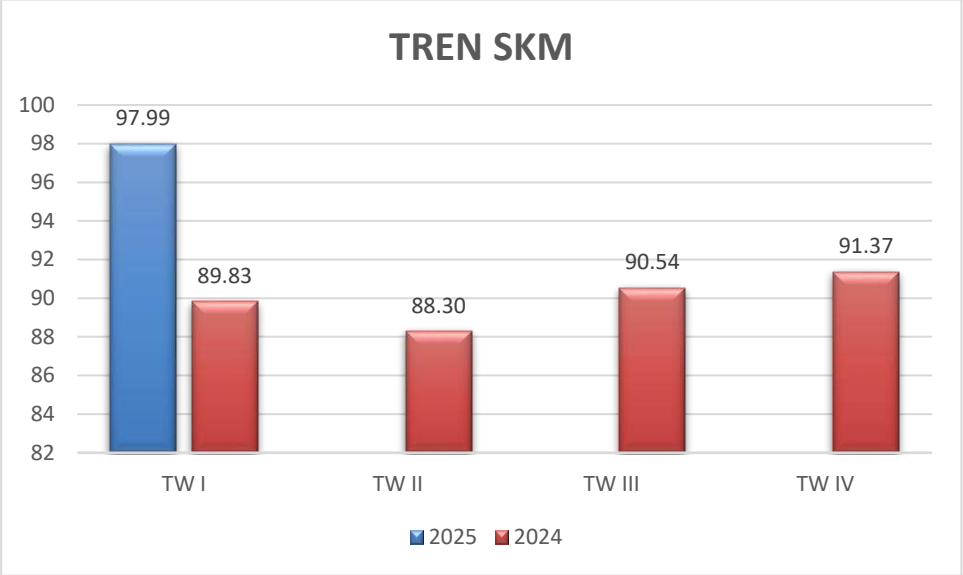

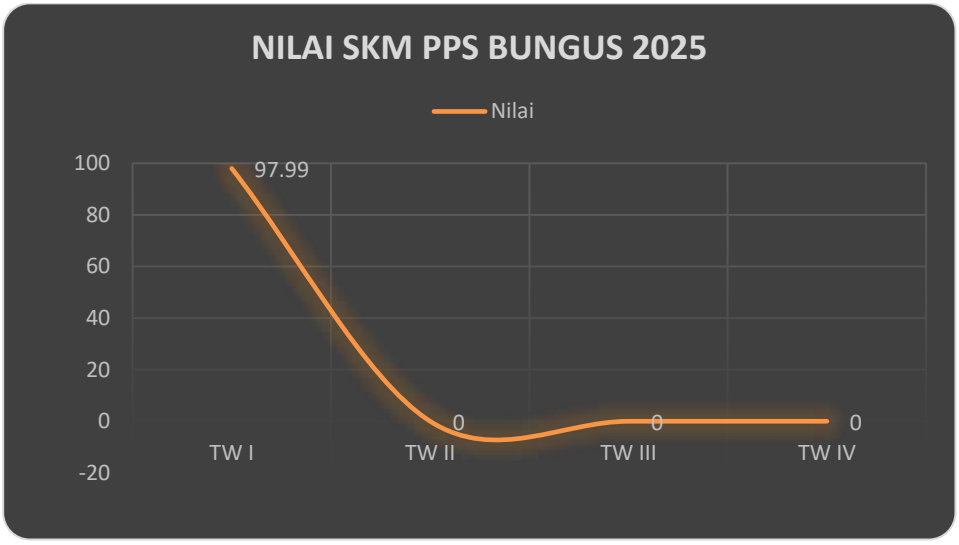

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dari seluruh data yang dihimpun dari 196 responden, didapatkan Nilai Interval (NI) Per Unsur untuk PPS Bungus Triwulan I Tahun 2025 adalah 3.92 dengan IKM = 97.99 sehingga mempunyai mutu pelayanan A atau Sangat Baik.

2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Padang, 16 April 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PERIKANAN TANGKAP
REPUBLIK INDONESIA

Widodo, S.Pi., M.Sc

Lampiran

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

UNIT : PPS BUNGUS

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/55

KUESIONER SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROFIL RESPONDEN

Jenis Kelamin ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan Usia:..... Tahun

Pendidikan ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SMK ☐ S1/D4 ☐ S2

Pekerjaan ☐ PNS/TNI/Polri ☐ Swasta ☐ Wirausaha ☐ Lainnya

Jenis Pelayanan yang Diterima :.....

(Lingkari kode huruf sesuai persepsi Saudara)

1	Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyarat pelayanan dengan jenis pelayanannya. A Tidak sesuai. B Kurang sesuai. C Sesuai. D Sangat sesuai.	6	Pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. A Tidak kompeten B Kurang kompeten C Kompeten D Sangat kompeten
2	Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. A Tidak mudah. B Kurang mudah. C Mudah. D Sangat mudah.	7	Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan A Tidak sopan dan ramah B Kurang sopan dan ramah C Sopan dan ramah D Sangat sopan dan ramah
3	Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. A Tidak cepat B Kurang cepat C Cepat D Sangat cepat	8	Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana. A Buruk B Cukup C Baik D Sangat Baik
4	Pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. A Sangat mahal B Cukup mahal C Murah D Gratis	9	Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. A Tidak ada B Ada tetapi tidak berfungsi C Berfungsi kurang maksimal D Dikelola dengan baik
5	Pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. A Tidak sesuai B Kurang sesuai C Sesuai. D Sangat sesuai	10	Saran/masukan Saudara terhadap Unit Pelayanan ini:

Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : PPS BUNGUS
ALAMAT : Jl. Raya Padang - Painan KM. 16 Padang
TELP/FAX : Telp (0751) 751121, Fax (0751) 751122

Layanan Kepmen 54/2022
Jumlah Responden : 196
Triwulan : 1

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.	3	3	1	3	3	3	3	2	3	
5.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.92

22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25.	3	4	3	3	4	3	3	3	3	
26.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27.	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
28.	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
29.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

58.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
72.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
83.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
89.	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
90.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
92.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
93.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

94.	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
95.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
96.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
97.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
103.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
104.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
107.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
108.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
109.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
111.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
112.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
113.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
114.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
116.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
117.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
118.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
119.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
120.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
121.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
122.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
124.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
125.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
126.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
128.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
129.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

130.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
131.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
132.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
133.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
135.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
136.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
137.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
138.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
139.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
140.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
141.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
142.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
143.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
144.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
145.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
146.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
147.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
148.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
149.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
150.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
151.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
152.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
153.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
154.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
155.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
156.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
157.	4	3	4	3	4	3	3	4	4	
158.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
159.	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
160.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
161.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
162.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
163.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
164.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
165.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

166.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
167.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
168.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
169.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
170.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
171.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
172.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
173.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
174.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
175.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
176.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
177.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
178.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
179.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
180.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
181.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
182.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
183.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
184.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
185.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
186.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
187.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
188.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
189.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
190.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
191.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
192.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
193.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
194.	4	3	4	3	3	3	4	4	4	
195.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
196.	2	2	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai Per Unsur	769	768	767	768	769	768	769	768	768	

NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi	3.92	3.92	3.91	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	
IKM Per Pelayanan										**97.99**

Keterangan:
1. U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan
2. NRR = Nilai Rata-rata
3. IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
4. *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
5. **) = IKM Unit Pelayanan x 25

Jenis Pelayanan ini mempunyai:
1. NRR = 3.92
2. IKM = 97.99

artinya PPS Bungus mempunyai mutu pelayanan A (Sangat Baik)

NO	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3.	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4.	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

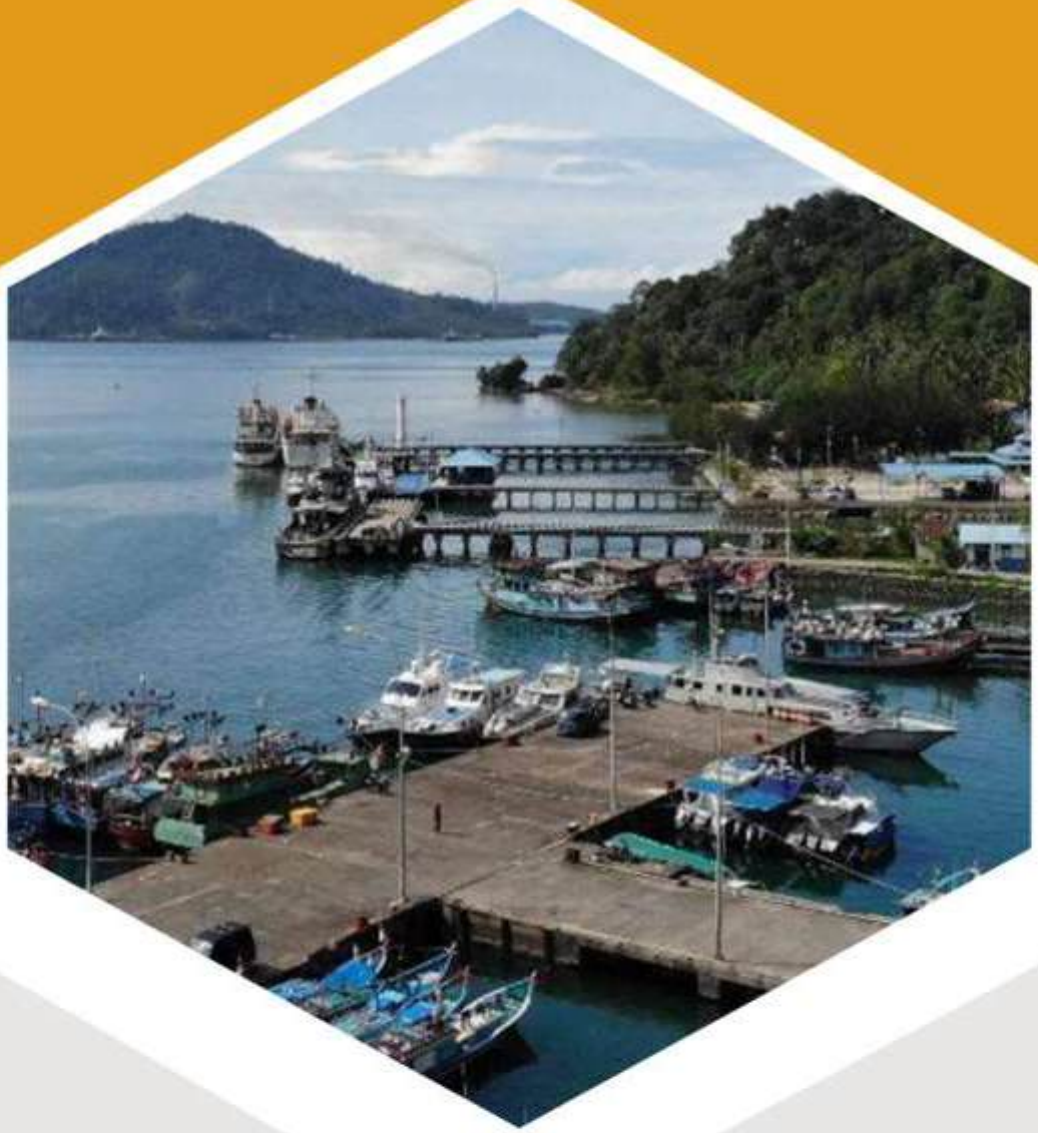

LAPORAN TINDAK LANJUT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV

TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses pelayanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas.

BAB II

DISKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus periode Triwulan IV menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	90.91	**A**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92.25	**A**
3	Waktu Penyelesaian	90.91	**A**
4	Biaya/Tarif	91.31	**A**
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	89.04	**A**
6	Kompetensi Pelaksana	91.18	**A**
7	Perilaku Pelaksana	93.18	**A**
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92.25	**A**
9	Sarana dan Prasarana	91.31	**A**

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai perbaikan pelayanan kedepan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

Untuk menunjang pelayanan yang berbasis Aplikasi dan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal di PPS Bungus.

- Pengguna jasa menginginkan peningkatan kebersihan di lingkungan Pelabuhan.
  1. Penyusunan jadwal pengambilan sampah secara rutin

- Pengguna jasa menginginkan proses validasi berkas lebih lengkap
  1. Melakukan refresing petugas kesayahbandaran bagi petugas yang belum mendapatkan pelatihan

- Pengguna jasa penyesuaian tarif air
  1. Pengusulan Revisi PP 85

4.2 Rencana Tindak Lanjut Triwulan IV

No	Rincian Kritik dan Saran	Program atau Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sampah tidak diangkut setiap hari	1.Penyusunan jadwal pengambilan sampah secara rutin					Plt. Kasubag Umum
2	Proses validasi lambat dikarenakan data permohonan tidak lengkap	2.Melakukan refresing petugas kesyahbandaran					Katimja Kesyahbandaran
		3.Pelatihan petugas kesayahbandaran bagi petugas yang belum mendapatkan pelatihan					
3	Tarif air kalau bisa disesuaikan dengan tarif PDAM	4.Pengusulan Revisi PP 85					Katimja Pelayanan Usaha

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

No	Rincian	Program/ Kegiatan	Keterangan RTL	Deskripsi Tindak Lanjut	Bukti / Dokumentasi Kegiatan	Tantangan
1	Sampah tidak diangkut setiap hari	Penyusunan jadwal pengambilan sampah secara rutin	Selesai	Telah dibuat jadwal pengangkutan sampah harian dan diinput kedalam aplikasi selaraskan.	PENGOLAHAN SAMPAH Minggu KE 3	

2	Proses validasi lambat dikarenakan data permohonan tidak lengkap	Melakukan refresing petugas kesyahbandaran	Selesai	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesyahbandaran .		
		Pelatihan petugas kesyahbandaran bagi petugas yang belum mendapat pelatihan	Belum Selesai	Akan dilaksannakan Pelatihan Operator Radio Kapal Perikanan.		

3	Tarif air kalau bisa disesuaikan dengan tarif PDAM	Pengusulan Revisi PP 85 ke Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap	Selesai	Masukan/Tanggapan atas RPP Revisi PP 85 Tahun 2021		

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, ada satu poin yang belum terlaksana yaitu pelatihan petugas kesyahbandaran bagi petugas yang belum mendapat pelatihan belum terlaksana dikarenakan pelaksanaan pada triwulan II bekerja sama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam komunikasi maritim menggunakan perangkat radio. maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melakukan dan merencanakan tindak lanjut sebanyak 75 %.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk senantiasa melakukan evaluasi dan menjadi lebih baik, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Padang, 14 April 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PERIKANAN TANGKAP
REPUBLIK INDONESIA

Widodo

Jadwal Pengangkutan Sampah sudah di Input pada Aplikasi Selaraskan

PENGOLAHAN SAMPAH

Minggu KE 3

DATA INPUT SAMPAH HARIAN DAN MINGGUAN SELARASKAN MARET 2025

Hari	Tanggal	Sampah darat (kg)	Sampah laut (kg)		Pemilahan sampah sesuai Jenisnya (kg)				Pengolahan Sampah		mingguan	
					Organik		Anorganik		Organik	Anorganik		
			Kolam Pelabuhan	Sampah dari kapal	Daun kayu	Organik lainnya	Plastik	Anorganik lainnya	Daun kayu/kayu/lainnya	Plastik	Organik	Anorganik
sabtu	1-Mar	80		77	45		112		45	112	Minggu ke 1	
minggu	2-Mar	80		41	20		101		20	101		
senin	3-Mar	120	10	20	25		120		25	120		
selasa	4-Mar	90	10	10	30		80		30	80		
rabu	5-Mar	85	10	10	20		85		20	85		
kamis	6-Mar	65		12	17		60		17	60		
jumat	7-Mar	78	15	30	25		98		25	98	182	656
sabtu	8-Mar								0	0	Minggu ke 2	
minggu	9-Mar	75		30	25		105		25	105		
senin	10-Mar	80		20	30		75		30	75		
selasa	11-Mar	60	5	10	15		60		15	60		
rabu	12-Mar	50	10	50	40		70		40	70		
kamis	13-Mar	85	20		40		65		40	65		
jumat	14-Mar	60		25	10		75		10	75	160	450
sabtu	15-Mar								0	0	Minggu ke 3	
minggu	16-Mar								0	0		
senin	17-Mar	70		10	10		70		10	70		
selasa	18-Mar	50		10	10		50		10	50		
rabu	19-Mar	75	20	10	15		90		15	90		
kamis	20-Mar	85		25	30		80		30	80		
jumat	21-Mar	110		20	20		110		20	110	85	400
sabtu	22-Mar									0		

Dokumentasi pengambilan sampah

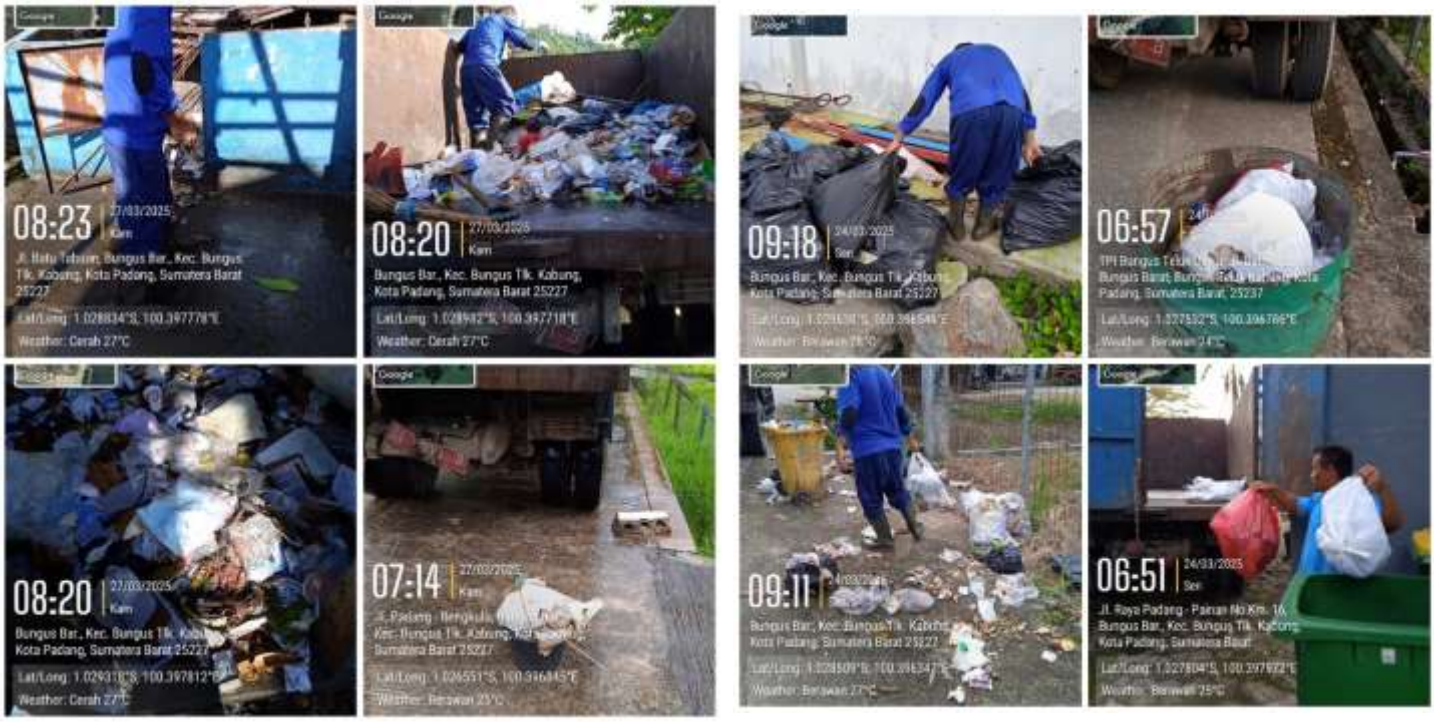

Rapat Koordinasi Pelayanan Kesyahbandaran

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor	:	B.947/PPSB/TU.330/IV/2025	15 April 2025
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	Satu lembar	
Hal	:	Undangan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan sinergi pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, serta untuk membahas berbagai kendala dan solusi yang dihadapi dalam operasional di lapangan, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada,

hari, tanggal	:	Rabu, 16 April 2025
waktu	:	pukul 09.00 WIB s.d selesai
tempat	:	Ruang Rapat PPS Bungus, Jl. Padang Painan KM.16, Bungus Teluk Kabung Kota Padang
acara	:	1. Koordinasi Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 2. Hal-hal yang berkembang dalam rapat

Berkenaan dengan pentingnya hal tersebut, mohon Bapak/Ibu untuk hadir dan tidak dapat diwakilkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.947/PPSB/TU.330/IV/2025
Tanggal : 15 April 2025

DAFTAR YANG DIUNDANG

No	Nama
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
2.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
3.	Kepala Satwas SDKP Padang
4.	Pemilik Kapal Penangkapan Ikan (maksimal 10 orang)

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumentasi Rapat Kordinasi Pelayanan

Permohonan Bantuan Pendataan Peserta Pelatihan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
KOMINFO
Jl. TPU Air Dingin RT 001/009, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat 25171
www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id T: (0751) 8962111 WA: 08131660111
E: uptpdg@postel.go.id / tu.upt_padang@kominfo.go.id

Nomor : B-93 /Balmon.13/SP.02.04/03/2025 Padang, 11 Maret 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Pendataan Peserta Kegiatan Sosialisasi *Maritim On The Spot* dan Bimtek *Long Range Certificate* (LRC)

Kepada Yth,
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
di Tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Maritim On The Spot* (MOTS) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Long Range Certificate* (LRC) yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang, kami bermaksud meminta bantuan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam mencari peserta dengan mengumpulan KTP dan foto peserta.

Data ini diperlukan untuk diinput pada aplikasi SERENA-DJID sebagai bagian dari proses administrasi dan verifikasi peserta. Oleh karena itu, kami mohon kesediaan PPS Bungus untuk membantu mengumpulkan dan mengirimkan salinan KTP serta foto peserta yang telah direkomendasikan paling lambat tanggal 07 April 2025, agar proses input dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam komunikasi maritim menggunakan perangkat radio serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Revisi PP 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor	:	B.767/PPSB/HK.140/III/2025	14 Maret 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	Satu lembar	
Hal	:	Masukan/Tanggapan atas RPP Revisi PP 85 Tahun 2021	

Yth. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap nomor B.954/DJPT.1/HK.140/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Masukan/Tanggapan, terlampir kami sampaikan masukan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus atas RPP Revisi Peraturan Pemerintah Nomomr 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.767/PPSB/HK.140/III/2025
Tanggal : 14 Maret 2025

MASUKAN/TANGGAPAN ATAS RPP REVISI PP NO 85 TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU DI KKP

No	PP No 85 Tahun 2021			Usulan Revisi			Justifikasi
	Jenis PNBP	Satuan	Tarif	Jenis PNBP	Satuan	Tarif	
II. PELABUHAN PERIKANAN							
C. Pelayanan Pengadaan Air							
1	1. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Sumur Sendiri (Sumur Bor) yang Dialirkan						
	a. Melalui Pipa di Dermaga/ Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Lainnya	Per Liter	20,00	a. Melalui Pipa di Dermaga/ Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Lainnya	Per Liter	15,00	Keputusan Wali Kota Padang No 642 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2023
IV. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI							
A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan							
2	1. Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan						
	a. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan						
	1) Klaster 1	per m² per tahun	10.000,00	1) Klaster 1	per m² per tahun	35.000,00	- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk:						
	c. Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan						
	3) Bangunan Permanen	per m² per tahun	15.000,00	3) Bangunan Permanen	per m² per tahun	46.500,00	- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara